



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di cacat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal XXXX).

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan XXXX hingga sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun, saat ini dibawa asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1 Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
 - 4.2 Tergugat sering keluyuran malam dan jarang pulang ke rumah;
 - 4.3 Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki atau mengancam akan membunuh dan menyatakan akan menceraikan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 April 2019 dan saat itu Tergugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya di Kelurahan Tanah Tinggi Ternate;
7. Bahwa Penggugat tidak ridho atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 27 Oktober 2020, ternyata bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat, sehingga tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 27 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat, sehingga tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MURSAL AYUB. S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.SS



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I
Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I
Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB. S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	6.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)